

**PROBLEMATIKA KERJASAMA PERUSAHAAN
DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TEGAL DALAM BIDANG CATU AIR**



PROPOSAL

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

DHANY FIRTA BANANI

NPM. 5116500051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PROBLEMATIKA KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH
PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA TEGAL DALAM BIDANG CATU AIR**

Dhany Firsta Banani

NPM. 5116500051

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen pembimbing

Tegal, 27 Juli 2020

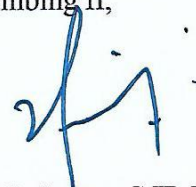
Pembimbing I,



Soesi Idayanti, S.H, M.H

NIDN. 0627086403

Pembimbing II,

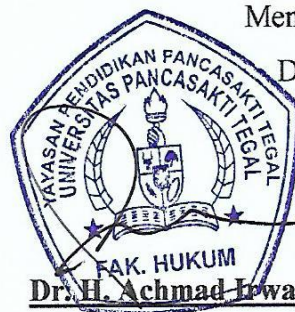


Kanti Rahayu., S.H, M.H

NIDN. 0620108203

Mengetahui,

Dekan,



Dr. H. Achmad Iwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH
PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA TEGAL DALAM BIDANG CATU AIR**

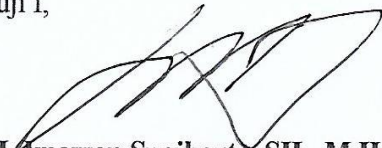
Dhany Firsta Banani

NPM. 5116500051

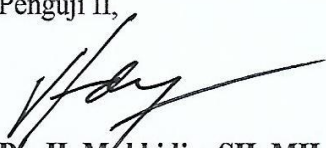
Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 27 Juli 2020


Penguji I,


Dr. H. Imawan Sugiharto, SH., M.H
NIDN. 0613035701


Penguji II,

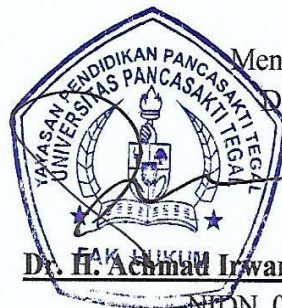

Dr. H. Mukhidin, SH., MH.
NIDN. 0621076101

Pembimbing I,


Soesi Idavanti, S.H, M.H
NIDN. 0627086403

Pembimbing II,


Kanti Rahayu., S.H, M.H
NIDN. 0620108203



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhany Firsta Banani
NPM : 5116500051
Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Tegal, 11 Mei 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA KERJASAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH
PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TEGAL DALAM BIDANG CATU AIR**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Dhany Firsta Banani

ABSTRAK

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok pada kehidupan manusia utamanya sebagai penopang kesehatan. Pemenuhan kebutuhan air bersih pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah melalui PDAB atau PDAM, dimana banyak permasalahan yang ditemui diantaranya adalah terjadinya kebocoran, yang merugikan pelanggan juga merugikan PDAB atau PDAM sehingga sulit menghitung debit air yang hilang atau yang disebut *Non – Revenue Water (NRW)*

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji problematika kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah (PDAB) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dalam bidang catu air.
2. Untuk mengkaji solusi dari problematika dan kendala dalam kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dalam bidang catu air.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan normatif-empiris, pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi, sedangkan analisisnya menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

Hasil penelitian ini adalah (1) Tanggung jawab serta kewenangan perbaikan pipa transmisi sesuai dengan wilayahnya, (2) Permasalahan yang timbul di lapangan yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan perjanjian yang dibuat, maka penanganannya dengan melakukan koordinasi sehingga tidak sampai untuk dibawa keranah pengadilan.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Kerjasama, BUMD, PDAB, PDAM

ABSTRACT

Water is one of the basic necessities in human life as a health support. Fulfillment of the needs of management clean water is done by the government through PDAB or PDAM, where many problems encountered among them is the occurrence of leakage, which harm the customer also harm the PDAB or PDAM so it is difficult to calculate the lost water discharge or so-called Non-Revenue Water (NRW)

The research aims:

1. To review the cooperation problems of the Central Java Provincial Clean Water Company (PDAB) with the regional water supply (PDAM) Kota Tegal in the field of water. 2. To review the solution of problems and constraints in the cooperation of the regional Water Supply Company (PDAB) Central Java province with the company regional Drinking water (PDAM) Tegal City in the field of water supply.

The research uses Field research methods, with a normative-empirical approach, data collection through documentation, interviews and observations, while the analysis uses qualitative analytical techniques which are a process of research and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problems. In this approach, a research procedure that generates descriptive data in the form of written or spoken words from those observed and behaviors is observed.

The results of this research is (1) the responsibility and the repair of the transmission pipeline in accordance with its territory, (2) Problems arising in the field that resulted in a discrepancy with the agreement made, then the handling by coordinating so as not to be brought the Court of Justice.

The results of this research are expected to be information materials for students, academics, practitioners, and all the needy in the environment Faculty of Law Universitas Pancasakti Tegal.

Keywords: cooperation, BUMD, PDAB, PDAM

MOTTO

- Hanya Sedikit Pekerjaan yang Bisa Dilakukan Sendirian, Namun Bersama-Sama Bisa Kerjakan Banyak Hal – Helen Keller
- Persatuan adalah kekuatan Bila ada kerja sama tim dan kolaborasi, hal indah dapat dicapai – Mattie Stepanek

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Orang tua tercinta Bapak Anton dan Ibu Retno.
3. Teman – teman Avanger

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan yang maha Esa , yang mengatur kehidupan di dunia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya dengan harapan mendapat syafa'at di hari kiamat nanti. Dengan Skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, doa, dan motivasinya selama ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II
4. Dr. H. Sanusi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Tiyas Vika Widyastuti, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

7. Soesi Idayanti, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
9. Orang tua, serta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moriil dan materil selama ini serta telah memberi support dan motivasi dalam menempuh studi dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya Uswatun Khasanah, S,.H yang membantu penyusunan skripsi ini.
11. Seseorang spesial yang selalu mendampingi penulis dengan sabar, ikhlas, memberikan dukungan moriil serta dorongan dan motivasinya selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran studi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan dan doanya dapat diterima Allah SWT, serta dinilai sebagai amal ibadah yang baik. Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, meskipun segala pikiran dan tenaga sudah tercurahkan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan berikutnya.

Tegal, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	15
A. Pengertian Problematika	15

B. Pengertian Perjanjian dan Kontrak	17
C. Sumber Sumber Hukum Kontrak	17
D. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian	20
E. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	23
F. Ganti Rugi	27
G. Keadaan Memaksa	28
H. Pengertian Badan Usaha	31
I. Dasar Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah	36
J. Dasar Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
1. Problematika dan Kendala yang dihadapi pada kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dalam bidang catu air	44
2. Solusi dalam kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dalam bidang catu air	55
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.¹ Dalam Jurnal Skripsi Yudho Taruno Muryanto yang berjudul Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance menjelaskan pengertian BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD).² Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah. Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah merupakan Perusahaan Daerah milik Provinsi Jawa Tengah yang membantu kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di tiga wilayah yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Tujuan pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan air bersih baik untuk air minum maupun untuk keperluan lain.

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

² Yudho Taruno Muryanto dan djuwityastuti, *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam rangka mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 1 Januari 2014, Surakarta, 2014, hlm. 1.

2. Memelihara dan melindungi kelestarian sumber daya air.
3. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.³

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak melayani kebutuhan air bersih di wilayah Kota Tegal dengan total kapasitas air baku 400 L/DT melalui sumber mata air

1. Bumijawa kapasitas produksi 70 L/DT.
2. Kaligiri kapasitas produksi 110 L/DT.
3. Reservoir Yamansari JDU kapasitas produksi 200 L/DT baru termanfaatkan 100 s/d 50,98 L/DT.

Kegiatannya meliputi sambungan baru, perawatan sambungan yang telah ada serta pemutusan sambungan bagi pelanggan yang tidak lagi mempergunakan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal tersebut ataupun pelanggan yang tidak membayar tagihan rekening yang telah dibebankan kepada pelanggan.⁴ Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan

³ PDAB, “*Profil PDAB*”, diakses dari <https://pdabtirtautama.com/profil>, pada tanggal 9 April 2020 pukul 14.07

⁴ Profil PDAM Kota Tegal, Hlm 3.

rakyat dan tenaga kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan pelayanan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan air bersih dan sehat yang mencukupi kebutuhan masyarakat.⁵

Tujuan adanya perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal yaitu :

1. Untuk membagi Sumber Daya Air secara proposional kepada 3 wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes.
2. Menjaga hubungan kerjasama yang baik antar 3 wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes.
3. Untuk Menjaga Stabilitas Harga.
4. Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Air.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum kontrak merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya

⁵ Ibid, hlm 4.

saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu⁶

Setelah melakukan perjanjian pasti ada akibat persetujuan sesuai pada pasal 1338 KUH Perdata Indonesia, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan adanya perjanjian kerjasama dalam bidang catu (bagian yang sudah ditentukan banyaknya) air antar BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal tentunya ada hal – hal yang harus terpenuhi.

Pada kenyataannya dilapangan banyak sekali problematika atau masalah yang terjadi. Menurut Prajudi Atmosudirjo, Masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan, ditentukan untuk dicapai sehingga merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan⁷. Sehingga masalah yang ada harus dihadapi agar dapat memenuhi perjanjian yang di buat bersama antara Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.

⁶ Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 180.

⁷ <https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/masalah-dan-latar-belakang-masalah-maulidiah-oke.pdf>, diakses pada Senin, 15 Juni 2020, pukul 16.00 WIB.

Objek penelitian skripsi ini adalah mengenai problematika kerjasama dimana tolak ukur hasil kinerja pelaksanaan kerjasama antar BUMD ini adalah pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Tegal yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami, serta mengkaji masalah perjanjian kerjasama antar BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum dengan Perusahaan Daerah Air Bersih, maka penulis mengangkat dan mengkaji permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul :
“PROBLEMATIKA KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DALAM BIDANG CATU AIR”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika dan kendala yang dihadapi pada kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Dalam Bidang Catu Air ?
2. Apa saja solusi dari problematika dan kendala dalam kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Dalam Bidang Catu Air ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji problematika dan kendala kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dalam bidang catu air.
2. Untuk mengkaji solusi dari problematika dan kendala dalam kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dalam bidang catu air

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan Menambah Wawasan dan Pengetahuan Mengenai Kerjasama dalam prakteknya dimasyarakat.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan pustaka Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Perjanjian dan tentang Kerjasama.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif bagi peneliti untuk dapat mengetahui mengenai aspek hukum perjanjian khususnya berkaitan dengan perjanjian kerjasama dalam bidang catu air.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam melakukan peningkatan kinerja BUMD khususnya PDAM Kota Tegal untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Tegal.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya:

- 1) Debbie Vici Prastiti dan Holi Bina Wijaya, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Air Bersih Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus: Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar)*, 2012, Fakultas Teknik, UNDIP. Dalam jurnalnya yang berjudul *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Air Bersih Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus: Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerjasama antar Perusahaan Daerah Air Minum atau antar

PDAM yaitu antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar dan pada perjanjian kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum Karanganyar menjual sumber mata air kepada PDAM Surakarta. Sumber air tersebut adalah sumber mata air di Plesungan. PDAM Surakarta dapat memanfaatkan sumber mata air tersebut dan membayar Air Bawah Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar setiap bulannya.

Persamaan dengan Skripsi yang akan peneliti buat yaitu Menganalisis Kerjasama yang dilakukan antar BUMD.

Perbedaan dengan Skripsi yang akan peneliti buat yaitu Peneliti akan Menganalisis Kerjasama yang di lakukan antara BUMD Provinsi Jawa Tengah dengan BUMD Kota Tegal, Tempat untuk melaksanakan penelitian berbeda.

- 2) Darda Pasmatus, *Pelaksanaan Perjanjian Antara PDAM Kota Payakumbuh Dengan Pamsimas Kota Payakumbuh*, 2019, Fakultas Hukum, STIH PM. Dalam jurnalnya yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Antara PDAM Kota Payakumbuh Dengan Pamsimas Kota Payakumbuh. Skripsi ini membahas tentang Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan Pamsimas Kota Payakumbuh yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

Persamaan dengan Skripsi yang akan peneliti buat yaitu Menganalisis Kerjasama tentang permasalahan air untuk masyarakat.

Perbedaan dengan Skripsi yang akan peneliti buat yaitu Peneliti akan Menganalisis Kerjasama yang di lakukan antar BUMD Provinsi Jawa Tengah dengan BUMD Kota Tegal, tempat untuk melaksanakan penelitian berbeda.

- 3) Sahat S.E. Simorangkir, *Analisis Terhadap Perjanjian Pemasangan Air Minum antara PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dengan Pelanggan di Cabang Medan Denai*, 2010, Fakultas Hukum, UMA. Dalam Tesisnya yang berjudul Analisis Terhadap Perjanjian Pemasangan Air Minum antara PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dengan Pelanggan di Cabang Medan Denai, Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Pemasangan Air Minum antara PDAM dengan konsumen yang dimana didalam skripsi ini juga membahas keluhan pelanggan tentang pelayanan dalam Pemasangan Air Minum. Persamaan dengan Skripsi yang akan peneliti buat yaitu Menganalisis Perjanjian Kerjasama.

Perbedaan dengan Skripsi yang akan peneliti buat yaitu Peneliti akan Menganalisis Kerjasama antar BUMD Provinsi Jawa Tengah dengan BUMD Kota Tegal, Tempat untuk melaksanakan penelitian berbeda.

Skripsi peneliti membahas terkait perjanjian kerjasama antar BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dengan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB). Selain itu, setiap wilayah maupun daerah mempunyai letak geografis yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi

penyebab dan penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang menggunakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang bersangkutan. Selain itu penelitian lapangan ini diharuskan untuk membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuat kode dan dianalisis dalam berbagai cara.⁸ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena pada rumusan masalah peneliti akan mengkaji problematika yang ada dilapangan dalam kerjasama antar BUMD.

b) Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

⁸ Lexy j. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011, hlm.26.

a. Non judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

c. Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.⁹

c) Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari responden kepada pengumpul data melalui wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data mengenai hasil wawancara dan jawaban dari narasumber. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, atau sudah tersedia sebelumnya yang dapat diperoleh dari pihak lain yang berasal dari buku-buku maupun dokumen,¹⁰ yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini seperti Buku Profil PDAM.

⁹ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2006, hlm. 129.

Berdasarkan sumbernya, bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer sebagai berikut :
 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.¹²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa *Kamus Hukum*, dan *Encyclopedia*.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris cet.2*, Depok : Prenadamedia Group, 2016, hlm. 172.

¹² Ibid., hlm.173.

d) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif dan valid. Adapun metode yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), meliputi :

- 1) Studi dokumen, yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Studi Pustaka, yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang demikian dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan pihak kedua yaitu terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban dan tanggapan atas pertanyaan tersebut.¹³ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis.

e) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

¹³ Lexy j. Maleong, *Op.cit.*, hlm. 23.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Landasan Konseptual, bab ini berisi : penjelasan secara umum mengenai Fungsi Perjanjian Kerjasama Terhadap Catu Air di Kota Tegal

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi : uraian dan penjelasan serta pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama Antar BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dengan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) serta peran, hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama.

Bab IV Penutup, bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman : Literasi Media, 2015, hlm. 17.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Pengertian Problematika

Dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua kata “Problem” berarti “masalah, persoalan” sedangkan kata “problematika” adalah suatu yang masih menimbulkan masalah. Masalah belum dapat di pecahkan. Kata “problem” berarti “masalah, persoalan” sedangkan kata “problematika” diartikan dengan “suatu yang masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dikerjakan”¹⁵, Problematika menurut Oka (1974:15), adalah persoalan dengan berbagai kemungkinan cara pemecahan yang mungkin diterapkan tanpa mengevaluasi manakah yang lebih baik dari bentuk-bentuk yang ada itu. Adapun masalah itu sendiri “adalah suatu halangan atau hambatan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”¹⁶. maka dapat disimpulkan bahwa problematika adalah suatu permasalahan yang bersumber atau berasal dari hubungan dua faktor, sehingga menimbulkan situasi yang sangat menyulitkan dan memerlukan adanya suatu penyelesaian atau pemecahan, tanpa harus menilai terlebih dahulu manakah yang lebih baik.¹⁷

¹⁵ Muhammad Tri Ramdhani dan Siti Ramlah, “*Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sdn-3 Telangkah Desa Hampalit Kabupaten Katingan*”, 2015, hlm 28

¹⁶ Muh Rosihuddin, “*Pengertian Problematika Pembelajaran*”, dalam <https://www.banjirembun.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html> diakses pada Senin, 15 Juni 2020, pukul 16.00 WIB.

¹⁷ <http://repository.fkip.unja.ac.id/file?i=AjNUmj1QhXgRP3-t4JQKyX64-tF2P2ksqbpfmrhjo>, diakses pada Jumat, 26 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

B. Pengertian Perjanjian Dan Kontrak

Hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Bahkan dalam bahasa Indonesia sudah sering dipergunakan istilah “kontrak” ini.¹⁸ Perjanjian diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹ Menurut *Subekti* “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal”, Hukum Perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, ada pemberian kebebasan yang seluas luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁰ Sedangkan kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat

¹⁸ Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*”, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 179

¹⁹ Hananto Prasetyo, *pembaharuan hukum perjanjian sportentertainment Berbasis nilai keadilan (studi kasus pada petinju profesional di indonesia)*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm 67

²⁰ Chrystofer, Ery Agus Priyono dan Rinitami Njatrijani, *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)* Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Semarang : Universitas Diponegoro, 2017, hlm 2

tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian. Donal Black dalam Black Law Dictionary mendefinisikan kontrak sebagai sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tertentu. (M. Arsyad Sanusi:2001:36)²¹

C. Sumber - Sumber Hukum Kontrak

Sumber hukum kontrak di Indonesia memiliki dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum materiil dan sumber formal.

Sumber hukum materiil adalah tempat materi hukum itu diambil sehingga sumber hukum materiil merupakan faktor yang sangat membantu pembentukan hukum tersebut, misal sebagai berikut :

1. Hubungan sosial
2. Kekuatan politik
3. Situasi sosial politik
4. Tradisi atau pandangan keagamaan dan kesusilaan
5. Hasil penelitian ilmiah
6. Perkembangan internasional
7. Keadaan geografis

Sumber formal merupakan tempat untuk memperoleh kekuatan hukum

²¹ <http://digilib.unila.ac.id/9846/2/II.%20Tinjauan%20Pustaka%20.pdf>, diakses pada Jumat, 26 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

yang berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku. Hukum formal terdiri atas :

1. Undang – undang
2. Perjanjian antar negara
3. Yurisprudensi
4. Kebiasaan
5. Doktrin²²

Syarat sah perjanjian terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.²³ Para pihak yang sudah membuat kesepakatan atau kerjasama

²² Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016, hlm 210.

²³ Chrystofer, Ery Agus Priyono dan Rinitami Njatrijani, *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)* Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Semarang : Universitas Diponegoro, 2017, hlm 1

maka secara tidak langsung kedua pihak atau lebih memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing – masing pihak sehingga tidak menimbulkan wanprestasi diantara salah satu pihak, Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan - alasan yang diatur oleh undang - undang atau hal - hal yang disepakati dalam perjanjian.²⁴

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.
3. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.
4. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat dan barangnya harus diserahkan.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat dan undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan

²⁴ I Gusti Ngurah Anom, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, Denpasar : Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2015, hlm 184

bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ketiga Bab V sampai dengan bab XVIII.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang.²⁵

D. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338 KUHPdata dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena

²⁵ Retno Prabandari, Tesis : *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hlm. 25.

melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat. Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebab – sebab yang halal. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Selain itu hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain. Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua

pihak yang terlipat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan

- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
2. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya.
3. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusannya.

Hukum acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang, perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata,

yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.²⁶

E. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.²⁷

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, contoh : dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang.

²⁶ Reinhard Polito, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para pihak dalam kontrak Ditinjau dari kitab undang undang Hukum perdata*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hlm 138

²⁷ Deny Cristian, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm 3

Dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : membangun rumah / gedung, mengosongkan rumah.

Dalam perikatan yang objeknya “tidak berbuat sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama, dsb.²⁸

Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut :

1. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (nietig).
2. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (nietig).
3. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (nietig).
4. Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

²⁸ <http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan-wanprestasi.html#:~:text=Pengertian%20prestasi%20adalah%20sesuatu%20yang%20wajib%20dipenuhi%20oleh%20debitur%20dalam%20setiap%20perikatan.&text=Dalam%20hukum%20perdata%20kewajiban%20memenuhi%20prestasi%20selalu%20disertai%20jaminan%20harta%20kekayaan%20debitur>, diakses pada Jumat, 16 Juli 2020, pukul 11.00 WIB

5. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).²⁹

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena :

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmarcht*).

Debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika dalam keadaan :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
4. Memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Pada umumnya wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya. Dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, seorang kreditur harus memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan *sommatie* (somasi).

Akibat yang akan ditimbulkan dari adanya wanprestasi, yaitu:

²⁹ Ibid

1. Perikatan tetap ada dan kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali apabila ada kesengajaan.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi.³⁰
dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan yang dimana isinya *“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”*³¹

³⁰ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016, hlm 208.

³¹ <https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, diakses pada Jumat, 10 Juli 2020, pukul 11.00 WIB

F. Ganti Rugi

Ada dua macam sebab timbulnya ganti rugi, yaitu :

1. Ganti rugi karena wanprestasi, yaitu bentuk ganti rugi dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi ini diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari pasal 124 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata.³²
2. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah :

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu penggantian biaya – biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan pada bunga – bunga.³³

Dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian, kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dalam

³² Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016, hlm 215.

³³ Ibid, hlm 215

perkembangannya, menurut para ahli dan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Ganti rugi materiil, yaitu suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang atau kekayaan atau benda.
2. Kerugian immateriil, yaitu suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti kecewa, sakit hati dan lain – lain.

Akibat wanprestasi sangat merugikan bagi pihak kreditur. Oleh sebab itu jika telah diketahui adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan, dalam undang – undang berhak mengajukan masalah tersebut ke pengadilan.³⁴

G. Keadaan Memaksa

Dalam pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan, Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya, perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Kemudian dalam pasal 1245 KUH Perdata disebutkan, tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang

³⁴ Ibid, hlm 216

terhalang baginya. Dari penjelasan tersebut, ada tiga hal yang membuat debitur tidak dapat melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yaitu :

1. Hal yang tak terduga sebelumnya
2. Terjadinya secara kebetulan
3. Keadaan memaksa

Sehingga keadaan memaksa adalah keadaan yang menunjukkan bahwa debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Contoh: gempa bumi, banjir, lahar, dan lain lain. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam keadaan memaksa terdapat unsur – unsur berikut :

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak – pihak, khususnya debitur.³⁵

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Keadaan memaksa absolut yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya

³⁵ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016, hlm 217

kepada kreditur karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.

2. Keadaan memaksa yang relatif yaitu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Akan tetapi, pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan mengeluarkan biaya besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Akibat yang timbul dari keadaan memaksa, ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu :

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)
2. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.
3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata.³⁶

³⁶ Ibid, hlm 219

H. Pengertian Badan Usaha

Menurut Dominick Salvatore, pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual.³⁷ Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan :

1. Ayat 1 berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Ayat 2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Ayat 3 menyebutkan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

³⁷ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html>, diakses pada Jumat, 27 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

5. Ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. akan pembagian bentuk badan usaha.

Sebagaimana kita ketahui sesuai pasal 33 ayat 2 dan 3 menyebutkan Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan pasal 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh sebab itu PDAB dan PDAM sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diberikan kewenangan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebesar – besarnya. Badan usaha yang dikenal di Indonesia ada tiga, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dalam pasal tersebut tertuang adanya konsep Demokrasi Ekonomi yaitu adanya kebebasan berusaha bagi seluruh warga negaranya dengan batas – batas tertentu. Batas – batas dalam menjalankan bisnis meliputi dua macam jenis usaha, di mana terhadap kedua jenis usaha ini pihak swasta dibatasi gerak usahanya. Kedua jenis usaha itu adalah :

1. Jenis – jenis usaha yang vital, yaitu usaha – usaha yang memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Negara, misalnya minyak dan gas bumi, baja, hasil tambang, dan lain – lain.
2. Jenis – jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya air minum, perlistrikan, kereta api, telekomunikasi dan lain – lain.³⁸

³⁸[http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+\(Bentuk+Badan+Usaha\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+(Bentuk+Badan+Usaha).pdf), diakses pada Jumat, 27 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Saat ini sudah ada 3 bentuk BUMN, yaitu :

1. Perjan (Perusahaan Jawatan)

Perjan merupakan salah satu bentuk badan usah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Kemudian perjan fokus melayani masyarakat. Namun karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi hal tersebut, maka sudah tidak terapkan lagi. Contoh Perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), sekarang menjadi PT. KAI

2. Perum (Perusahaan Umum)

Perum ibarat perubahan dari Perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai Pegawai Negeri. Walaupun sudah berusaha mencari keuntungan namun tetap saja merugi, sehingga Negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Persero.

3. Persero

Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara, tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat.

Ciri-ciri Persero :

- a. Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
 - b. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham
 - c. Dipimpin oleh direksi
 - d. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
 - e. Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
 - f. Tidak memperoleh fasilitas negara Contoh Persero : PT. Kereta Api Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Pos Indonesia dan masih banyak lagi.³⁹
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah.⁴⁰ Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah

³⁹ <https://docplayer.info/storage/75/72736382/72736382.pdf> , diakses pada Jumat, 27 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

⁴⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/8673/3/2EA15189.pdf> , diakses pada Jumat, 27 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah.

BUMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
3. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
4. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
5. Melayani kepentingan masyarakat umum, selain mencari keuntungan.
6. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
7. Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (pendapatan asli daerah).
8. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah daerah, dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
9. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public.
10. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank.

11. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di pengadilan.

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki tujuan yaitu :

1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah.
2. Mengejar dan mencari keuntungan.
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
6. Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
7. Memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan didaerahnya.⁴¹

I. Dasar Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah dalam pasal 2 menerangkan Pendirian Perusahaan Daerah dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengusahaan air bersih dengan memanfaatkan sumber daya air guna menyediakan air minum dan/atau

⁴¹ Ibid.

keperluan lain, dan memberikan pelayanan yang baik. Dalam pasal 3 menerangkan :

1. Pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Daerah Air Bersih ini berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Dalam pasal 10 ayat 2 organ perusahaan daerah terdiri atas :

- a. Gubernur selaku pemilik modal
- b. Dewan pengawas dan
- c. Direksi

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas dalam pasal 15 menerangkan tugas dari Dewan pengawas yaitu :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah.
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah.
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (businessplan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran

Tahunan Perusahaan Daerah yang dibuat Direksi kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Wewenang dari Dewan Pengawas dalam pasal 16 menjelaskan :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah.
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi sebelum mendapat pengesahan Gubernur.
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah.
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Gubernur.

Dalam pasal 30 tentang Wewenang dan Tugas Direksi menerangkan Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- b. membina pegawai.
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Gubernur melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana

Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah.

Selain tugas yang diatur Wewenang sebagai Direksi di atur juga dalam pasal 32 yang menerangkan :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah.
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.
- d. mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan.
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah.
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas.

melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah.

J. Dasar Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal

Peraturan daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dalam BAB II tentang Maksud dan Tujuan pasal 2 pembentukan PDAM dimaksudkan :

1. Memberi jasa pelayanan air minum
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
3. Menunjang pendapatan daerah

Dalam pasal 3 menerangkan tujuan PDAM :

1. Memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat – syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah dan daerah sekitar
2. Memberikan kontribusi pada pendapatan daerah
3. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan nasional

Pada pasal 5 menerangkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat mendirikan kantor perwakilan, organ perusahaan daerah air minum disebutkan dalam pasal 9 yaitu :

1. Walikota selaku pemilik modal
2. Dewan Pengawas
3. Direksi

dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal juga memiliki Dewan Pengawas yang tugas dan wewenangnya di atur dalam pasal 13 menerangkan Dewan Pengawas mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM.
2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada walikota guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain berkaitan dengan pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
3. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis serta RKAP yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Dewan Pengawas kepada Walikota.

Dalam pasal 14 menerangkan wewenang dari Dewan Pengawas yaitu :

1. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM.
2. Menilai laporan triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota.
3. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM.
4. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pada pasal 25 menerangkan tugas dan wewenang dari Direksi yaitu :

1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM.
2. Membina pegawai.
3. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM.
4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
5. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
6. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran strategis tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Sedangkan pada pasal 26 menerangkan wewenang dari Direksi yaitu :

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
3. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.
4. Mewakili PDAM di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

7. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM setelah mendapat persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
8. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan atau tanpa menjaminkan aset PDAM setelah mendapat persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Dan Kendala Yang Dihadapi Pada Kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Dalam Bidang Catu Air

Hasil penelitian yang peneliti peroleh dari kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal mendapat beberapa problematika atau kendala yang dihadapi yaitu :

Potensi yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal untuk menghasilkan air bersih. Potensi Sumber Mata Air Kaligiri yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah berada di Desa Kaligiri, Kecamatan Sirampog, Brebes yang dapat menghasilkan debit air sebesar 250 Liter / Detik.⁴² Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal memiliki sumber mata air sendiri yaitu Sumber Mata Air Bulakan yang terletak di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang dapat menghasilkan debit air sebesar 70 Liter / Detik.⁴³

⁴² Profil PDAB diakses pada <https://pdabtirtautama.com/profil>, pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 14.00

⁴³ Profil PDAM Kota Tegal, hlm 3

Kondisi pelayanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal peneliti membuat dalam bentuk tabel dalam jarak 6 tahun kebelakang agar dapat membantu memperjelas perkembangan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dengan debit air yang setiap tahunnya mengalami pengurangan.

	Satuan	2014	2015	2016	Per 31 Desember 2017*	Per 30 Sept 2018*	Per Des 2018*	Per Feb 2020*
Jumlah Penduduk	Jiwa	244.998	246.084	247.059	281.809	282.837	282.837	282.837
Cakupan Pelayanan	%	39,92	45,49	57,86	58,58 %	62,15 %	63,20 %	77,90 %
Rata – rata konsumsi Air Rumah Tangga	M ³ /SL/ bln	15,66	12,59	10,47	10,20	11,79	11,79	11,79
Jumlah Pelanggan	SR	16.110	17.716	23.280	27.042	28.835	29.329	32.069
Volume Produksi	M ³ / tahun	6.222.326	6.296.611	6.390.167	7.394.758	5.692.637	5.692.637	5.692.637
	L/dt	200,046	202,437	205	237,74	244,03	244,03	244,03 ⁴⁴

Tabel 1 Kondisi Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal

Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi dengan melihat pada kantor pusat yang ada di Kota Semarang, dengan beberapa bidang yang mendukung untuk membantu pekerjaan pada kantor cabang yang ada di Kabupaten Tegal sehingga dapat berkoordinasi dengan baik dengan pihak kantor pusat. Kantor cabang yang ada di Kabupaten Tegal sering melaksanakan rapat koordinasi, minimal satu kali dalam seminggu dan bahkan bisa lebih untuk melakukan rapat koordinasi sehingga bisa menyajikan laporan

⁴⁴ Profil PDAM Kota Tegal, hlm 7

pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berbentuk harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

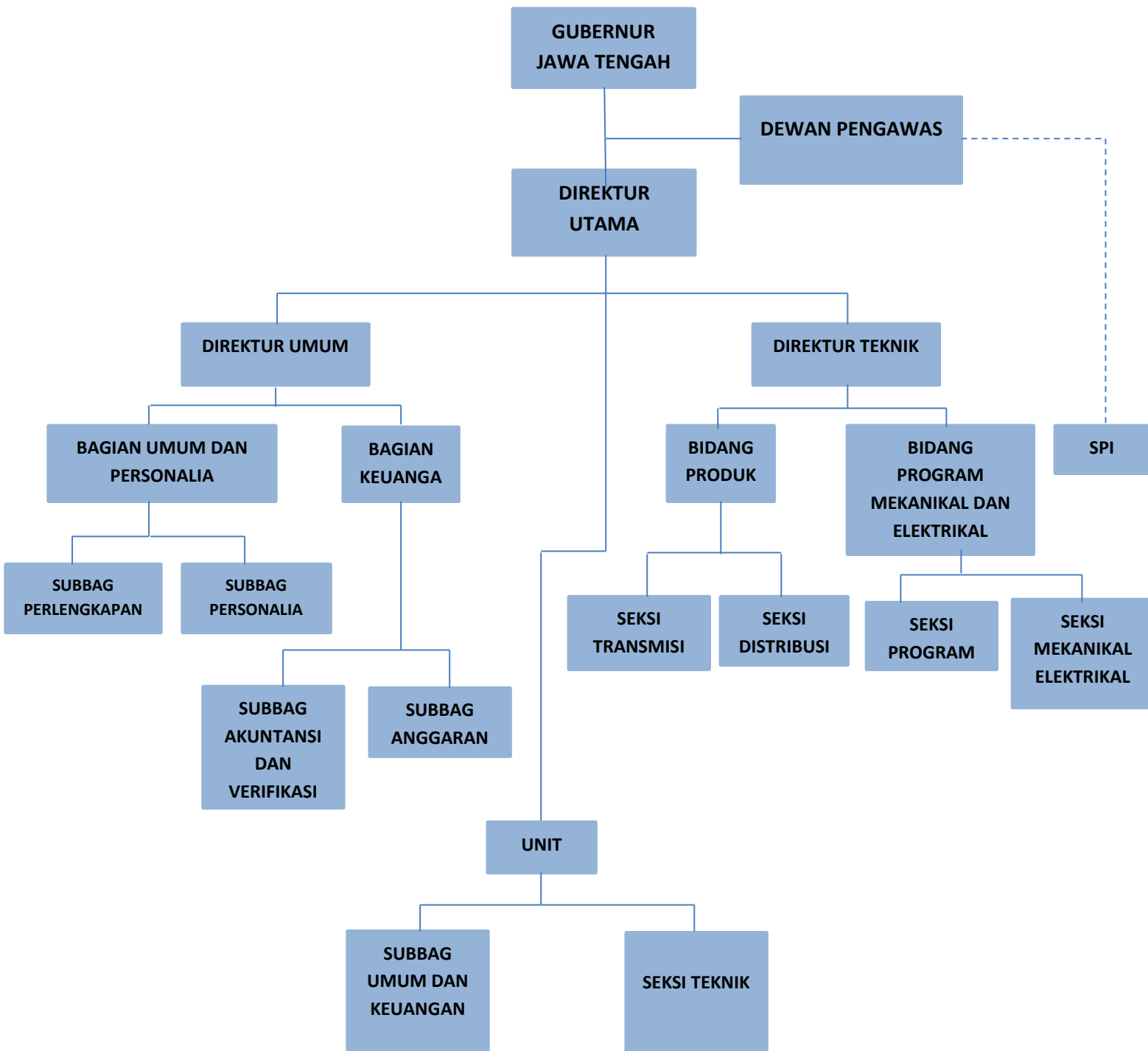
Rapat koordinasi dilakukan guna membahas tentang kebijakan yang harus diambil terkait dengan kendala dan permasalahan dilapangan, perencanaan, penganggaran, program kerja.

Adapun visi misi dari Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah adalah :

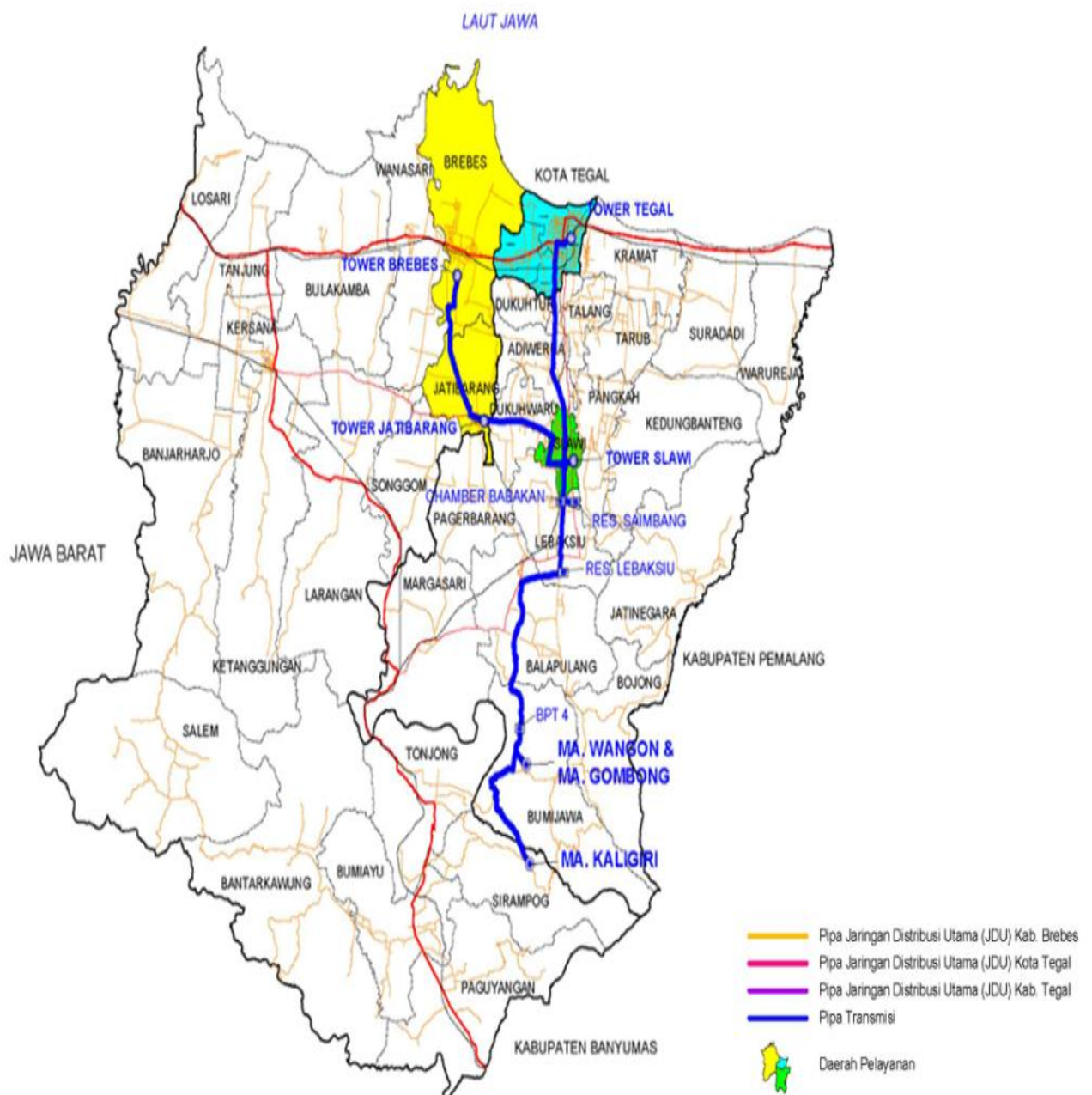
Visi : Mewujudkan Pelayanan Air Bersih Yang Prima Bagi Masyarakat Jawa Tengah Melalui Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.

- Misi :
1. Menyediakan air bersih yang memenuhi persyaratan dari segi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
 2. Meningkatkan cakupan pelayanan terhadap akses aman air bersih sesuai dengan target RPJMN.
 3. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan profesionalisme karyawan.
 4. Memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah.

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah



Sebagai data guna memberikan gambaran tentang pelaksanaan program kegiatan dilapangan kami sampaikan peta jalur pipa transmisi dari Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah



Perusahaan Daerah Air Minum memiliki struktur organisasi yang memiliki banyak bidang untuk menunjang kinerja dalam penyediaan air bersih dengan pelayanan konsumen sehingga semua aspek bisa bekerja dengan optimal, dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal memiliki jadwal terstruktur untuk melakukan laporan yaitu bulanan, triwulan, tahunan.

Adapun visi misi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal adalah :

Visi : Terdepan dan Tersehat dalam Pelayanan

Misi : 1. Memberikan pelayanan air bersih terbaik adil dan merata

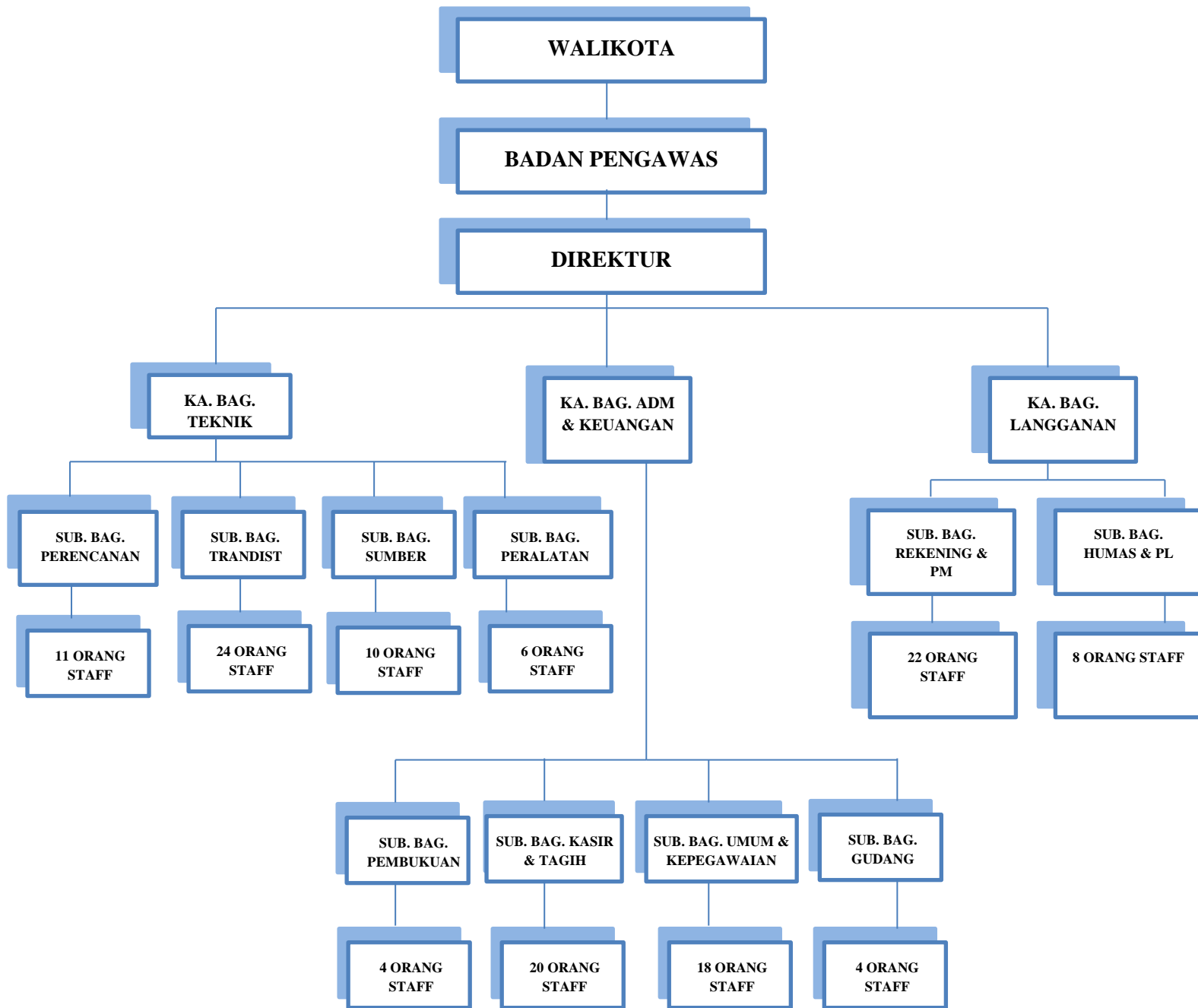
2. Memberikan tarif air minum yang terjangkau

3. Menjaga kelestarian dan ketersediaan air baku

4. Meningkatkan profesionalisme

5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal



46

⁴⁶ Ibid, hlm 6

Dengan melihat potensi sdm yang terorganisir pada struktur organisasi dari masing – masing perusahaan serta visi, misinya diharapkan penanganan pengelolaan air dapat dilakukan secara maksimal, karena sebagaimana kita ketahui bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup setiap manusia, tanpa adanya air yang bersih atau layak untuk dikonsumsi maka manusia akan mengalami banyak permasalahan, selain itu penggunaan air adalah menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan pihak swasta murni untuk mengelolanya, sehingga yang berwenang sebagai pemilik atau pengelola sumber daya alam adalah negara.

Pada zaman dahulu konsumen pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal cakupan wilayahnya meliputi tiga wilayah yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes dengan alamat kantor di Jl. Hang Tuah No. 29 Kota Tegal, dan pada saat itu konsumen yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal adalah orang yang memiliki status ekonomi menengah ke atas yang berarti masih sedikit dan sumber mata air yang digunakan hanya satu yaitu mata air Bulakan, Bumijawa untuk dimanfaatkan oleh ketiga wilayah tersebut. Pada tahun 1992 pemerintah provinsi Jawa Tengah membentuk suatu lembaga yang menangani pengelolaan air, dinamakan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dengan bekerjasama dengan Kremitanstalt fur Weideranfbau (KfW) dari Jerman Barat untuk membangun Saranan Air

Bersih Tegal dengan memanfaatkan Mata Air Kaligiri di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

Awalnya sumber mata air yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal hanya dapat menghasilkan kapasitas debit air 70 liter/detik, dengan adanya Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) meningkat kapasitas debit airnya menjadi 125 liter/detik sehingga bisa mencukupi kebutuhan air untuk pelanggan Kota Tegal.

Seiring perkembangan kebutuhan dan peraturan maka kebijakan baru dibuat yaitu dengan membagi kantor dan loket pembayaran sesuai dengan masing - masing wilayah yaitu PDAM Kabupaten Tegal, PDAM Kota Tegal dan PDAM Kabupaten Brebes. Dan pada saat sekarang dengan perkembangan jumlah pelanggan maka setiap wilayah memiliki kantor dan kebijakan masing – masing karena peraturan di setiap wilayah yang diterapkan berbeda.

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal agar seluruh warga Kota Tegal mendapatkan pelayanan air bersih yang layak digunakan sesuai standar kesehatan dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat maka dibuat kebijakan dengan membuat penyesuaian biaya atau tarif rekening air, sehingga masyarakat akan mendapat pelayanan sama.

Dengan bertambahnya jumlah konsumen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal menjadikan jumlah debit air yang masuk ke Kota

Tegal tidak seimbang dengan terus bertambahnya jumlah konsumen sehingga banyak pelanggan atau konsumen air dari PDAM Kota Tegal yang mengalami gangguan pelayanan air, seperti misalnya air sulit atau tidak mengalir masuk ke setiap rumah konsumen, sehingga perlu adanya penambahan sumber mata air yang baru dan perlu adanya pengaturan catu air terhadap ketiga wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.

Ketiga wilayah pengelola air bersih yaitu PDAM Kota Tegal, PDAM Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes memiliki kebutuhan debit air yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, agar dapat merasakan pelayanan air bersih yang optimal tanpa merasakan lagi air yang tidak masuk ke rumah konsumen, sebab itu dari Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari setiap wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes membuat kesepakatan untuk debit air yang diperlukan oleh setiap wilayah tersebut sehingga salah satu wilayah tidak mengalami kelebihan atau kekurangan air.⁴⁷

Hal diatas tersebut merupakan beberapa rangkaian kejadian permasalahan yang timbul, sehingga menyebabkan terjadinya masalah – masalah baru lainnya, peneliti mendapatkan problematika atau permasalahan pada saat ini yaitu ada enam masalah diantaranya :

⁴⁷ Wawancara dengan Bpk Hendy, Kepala Unit SPAM BREGAS, di Kantor PDAB, tanggal 15 Juli 2020 jam 10.00 WIB.

- a) Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah menemukan sumber mata air baru di Banyumudal, Pemalang yang sebenarnya bisa untuk menambah debit air yang masuk ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal akan tetapi pada kenyataannya jaringan dan perlengkapannya belum siap untuk menerima penyerapan air dari Banyumudal, sehingga dialihkan untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes yang sudah siap untuk penyerapan air dari sumber air Banyumudal, kemudian seiring berjalannya waktu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal sudah siap untuk menerima penyerapan air dari Banyumudal tetapi air yang ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes sudah diperuntukan untuk pelanggan sehingga untuk penarikan debit airnya tidak mudah dalam jangka waktu yang singkat.
- b) Kesalahan yang selanjutnya yaitu tidak dihitungnya *Non – Revenue Water* (NRW) sehingga sering mengalami kekurangan debit air yang diperlukan.
- c) Pipa yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) mengalami kebocoran yang sering terjadi setiap 4 meter dengan panjang bisa 50 km dan sambungannya 4 meter yang karet perekatnya sudah mengalami aus sehingga apabila tekanan tinggi mengalami kebocoran.

- d) Pengaruh musim yang dapat mempengaruhi jumlah debit air dari sumber mata air dan tanah yang rawan terhadap pergeseran tanah atau tanah longsor.
- e) Anggaran yang sangat mahal untuk melakukan perawatan pipa yang sudah melewati batas usia.
- f) Debit air yang tidak memenuhi kebutuhan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal karena sering terjadi kebocoran pada pipa transmisi sehingga debit air yang diperlukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal tidak dapat terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan air konsumennya.⁴⁸

2. Solusi Dalam Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal Dalam Bidang Catu Air

Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal memiliki kebijakan sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk setiap permasalahan yang ada yaitu :

- a) Untuk melakukan penarikan air yang dialihkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Brebes yang tidak bisa ditarik kembali karena sudah menjadi air konsumsi untuk pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Brebes, maka untuk menangani hal ini Perusahaan

⁴⁸ Ibid

Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah harus mencari sumber mata air baru untuk memenuhi kekurangan catu air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal.

- b) *Non – Revenue Water* (NRW) yang tidak terhitung dari pihak Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari ketiga wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, harus saling koordinasi terkait *Non – Revenue Water* (NRW) yang tidak terhitung, karena dari Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahui persis kebocoran terletak bagian daerah mana. Dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah memiliki cara untuk mengetahui kehilangan debit air yang hilang jika mengalami kebocoran yaitu dengan 2 cara, secara fisik melakukan perbaikan pipa agar tidak mengalami kebocoran dan non fisik melihat dari alat pengukur debit air yang masuk ke Reservoir Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dengan cara fisik melakukan perbaikan pipa transmisi dan pipa distribusi dan non fisik mencatat meteran yang ada di setiap rumah konsumen, melihat dari alat pengukur debit air yang sudah masuk ke kota tegal apabila kebocoran sudah melewati alat pengukur debit air.
- c) Pipa yang sudah melewati batas usia harus segera diganti karena menyebabkan kebocoran. Akan tetapi kendala di Perusahaan Daerah

Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah mengenai penggantian pipa transmisi biaya sangat mahal karena dengan perhitungan dua setengah kilometer memerlukan biaya tiga puluh miliar rupiah sedangkan penggantian pipa yang diperlukan dari jarak sumber mata air sampai Reservoir adalah ± 50 kilometer.

- d) Untuk permasalahan musim yang mempengaruhi debit air dari sumber mata air tidak bisa diatasi secara optimal karena berasal langsung dari alam dan disamping itu Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah bukan system pengolahan air tetapi langsung dari sumber mata air.
- e) Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah membuat pengajuan anggaran melalui Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jawa Tengah setelah itu melalui Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jawa Tengah menyerahkan pengajuan ke Pemerintah Pusat.
- f) Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah mencari sumber mata air yang baru untuk memenuhi kekurangan debit air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) melakukan perbaikan pada pipa transmisi yang sering mengalami kebocoran atau mengganti pipa transmisi yang sudah melewati batas usia dengan pipa transmisi yang baru .⁴⁹

⁴⁹ Ibid

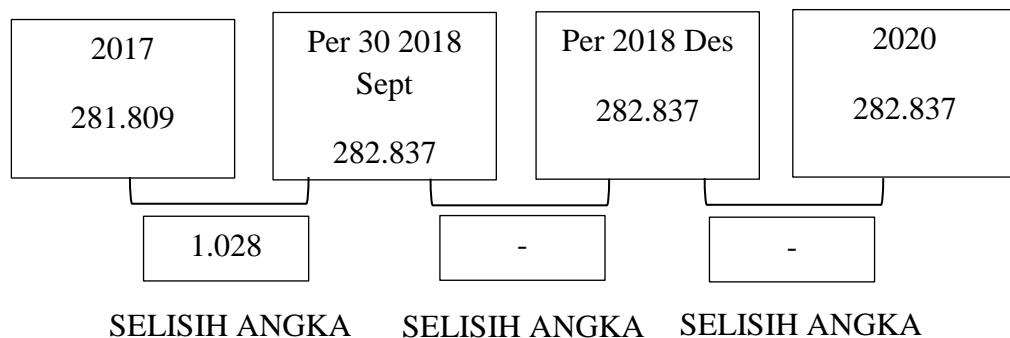
Berdasarkan data serta pembahasan tentang berbagai problematika dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal sebagaimana telah disampaikan diatas, perlu kiranya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai data kondisi pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

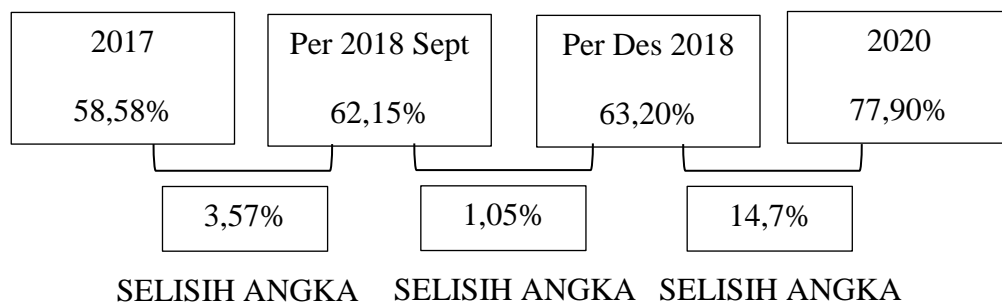
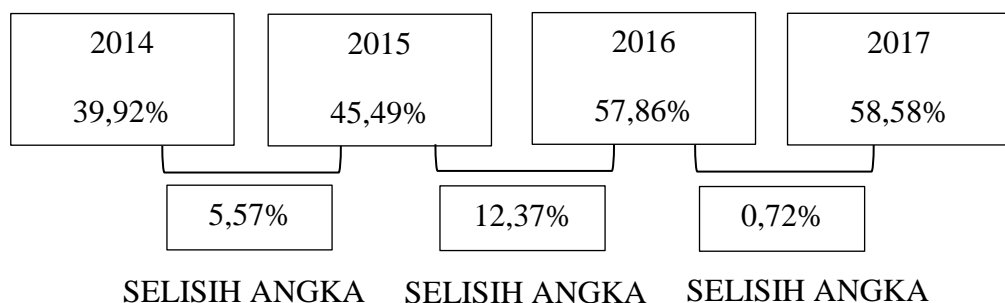
Kota Tegal bahwa :

- a. Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun 2014 s/d bulan Februari 2020 ternyata berbanding lurus dengan prosentase cakupan pelayan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, bahkan selisih prosentasenya mengecil terhadap data jumlah penduduk, yang berarti dengan bertambahnya tahun ternyata prosentase pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal bertambah baik dengan meningkatnya prosentase cakupan pelayanan per Februari 2020 sebesar 77,90% atas jumlah penduduk sebesar 282,837 jiwa, sebagai gambaran kami sampaikan sebagai berikut :

Jumlah Penduduk			
2014 244.998	2015 246.084	2016 247.059	2017 281.809
1.086		975	34.750
SELISIH ANGKA		SELISIH ANGKA	SELISIH ANGKA



Cakupan Pelayanan



50

- b. Rata-rata konsumsi air rumah tangga mulai tahun 2014 sampai satu tahun ke depan bertambah tetapi pada tahun 2016 sampai 2017 menurun, meskipun di tahun 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 menunjukkan kenaikan meskipun masih dibawah rata rata konsumsi air rumah tangga tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan hal tersebut diatas bila

⁵⁰ Profil PDAM Kota Tegal, hlm 7

dihubungkan dengan data jumlah pelanggan yang terus bertambah dari tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2020, dapat disampaikan bahwa pemenuhan rata – rata konsumsi air rumah tangga masih sangat kurang sehingga perlu penambahan jumlah air sehingga kebutuhan distribusi air kepada pelanggan Kota Tegal dapat terpenuhi.⁵¹

2. Sehubungan dengan berbagai problematika yang ditemui serta kenyataan kebutuhan air bagi pelanggan Kota Tegal, perlu penanganan secara menyeluruh, yaitu :
 - a. Strategi untuk penambahan jumlah air adalah perlu menambah sumber mata air baru.
 - b. Penanganan menanggulangi masalah kebocoran perlu lebih ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
3. Melakukan penggantian pipa secara berkala, mengingat biaya untuk pipa baru yang cukup mahal sehingga perlu adanya koordinasi dengan pihak pusat agar dapat segera teratasi.
4. PDAB perlu melakukan inovasi atau terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan air sehingga tidak terkendala dengan musim yang mempengaruhi debit air dari sumber mata air.
5. PDAB dalam membuat atau menyusun pengajuan kebutuhan pembiayaan perlu bekerjasama dengan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah sehingga benar – benar dalam menyusun pengajuan keperluan pembiayaan apa saja yang perlu mendapat prioritas sesuai dengan keadaan lapangan.

⁵¹ Ibid

6. Sementara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal tidak melakukan penambahan jaringan baru karena debit air yang sekarang belum memenuhi kebutuhan seluruh konsumen, disamping tetap mengupayakan cara penambahan jumlah kebutuhan air.

Berdasarkan skripsi yang peneliti ajukan dengan judul Problematika Kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Dalam Bidang Catu Air, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Bahwa kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal yang sudah berlangsung sejak tahun 1992 hingga sekarang dilakukan dengan perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat – syarat perjanjian sebagaimana tertuang dalam peraturan yang berlaku yaitu KUHPdata pasal 1320 yang menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Perjanjian kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dimana terdapat :

1. Kesepakatan yang mengikatkan diri yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal.
 2. Kecakapan membuat suatu perikatan, bahwa Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal adalah suatu badan hukum milik daerah.
 3. pokok persoalan tertentu yang menjadi obyek perjanjian adalah pembagian dalam bidang catu air.
 4. obyek perjanjian tersebut tidak terlarang
- b. Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Hukum kontrak merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam permasalahan ini yang dimaksud orang adalah badan hukum yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal yang masing masing membuat perjanjian kerjasama dalam arti mengikatkan diri satu dengan lainnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban dari pdab adalah

memberikan catu air kepada pdam kota tegal yang telah disepakati Termasuk dalam memberikan kelancaran penyampaian air kepada pdam kota tegal Sedangkan kewajiban dari pdam kota tegal adalah membayar catu air yang diterima dengan mendistribusikan kepada pelanggan kota tegal sesuai dengan harga yang telah disepakati, sehingga hak dari pdab merupakan kewajiban dari pdam kota tegal begitu pula sebaliknya, begitu pula sebaliknya hak pdam merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah.

- c. Sesuai pasal 1338 KUH Perdata Indonesia, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berkaitan dengan pasal tersebut diatas maka perjanjian kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Berlaku sebagai undang – undang bagi keduanya, perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang telah ditentukan oleh undang – undang dan perjanjian kerjasama ini harus dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut problematika ataupun permasalahan yang ditemui dilapangan sampai dengan saat ini tidak sampai masuk keranah pengadilan, tetapi penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara mengkoordinasikan untuk mendapatkan solusi yang terbaik, yang lebih memberikan manfaat kepada pelanggan, karena air bersih merupakan suatu kebutuhan primer setiap orang maka sudah menjadi prioritas bahwa jika ada masalah yang timbul harus diselesaikan pada saat itu juga ataupun dengan jangka waktu penanganan yang sesingkat - singkatnya, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi dalam hal ini lebih mengutamakan kebutuhan konsumen agar semaksimal mungkin terpenuhi selain itu jika melakukan penyelesaian masalahnya melalui pengadilan maka akan memakan banyak waktu dan diperlukan banyak biaya untuk berperkara dipengadilan, yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk menambah biaya oprasional maupun kebutuhan mendesak lainnya seperti pembelian pipa transmisi yang baru. Dengan keterangan ini maka bisa dilihat jika perjanjian yang dibuat Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal bersifat fleksibel sehingga tidak semua perkara atau masalah harus melalui pengadilan tetapi bisa diselesaikan dengan berkoordinasi untuk mencari solusi yang terbaik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap kerjasama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal dalam Bidang Catu Air sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal merupakan dua badan hukum yang melakukan kerjasama dalam pekerjaan untuk mendistribusikan air bersih utamanya kepada pelanggan masyarakat Kota Tegal dengan menemui berbagai problematika yaitu diantaranya :

- Sultinya memenuhi kebutuhan air bersih karena debit air yang kecil
- Sulitnya mendeteksi kehilangan air akibat kebocoran pipa dikarenakan pipa yang sudah melewati batas usia (dua puluh tahun lebih) sehingga sulit untuk penghitungan *Non – Revenue Water* (NRW)

2. Penyelesaian problematika tersebut diantaranya dengan :

- Menambah debit air dengan mencari sumber mata air baru ataupun pengolahan air menjadi air bersih

- Untuk mengurangi kehilangan air karena kebocoran maka diatasi dengan :
 - a) PDAB : cara fisik yaitu melakukan perbaikan pipa transmisi yang mengalami kebocoran. Kemudian cara non fisik dengan melihat dari alat pengukur debit air yang masuk ke resevoir
 - b) PDAM : cara fisik dengan melakukan perbaikan pipa transmisi dan pipa distribusi. Kemudian cara non fisik dengan mencatat meteran yang ada di setiap rumah konsumen.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Sering mengadakan rapat koordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari ketiga wilayah yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam kurangnya debit air yang diterima oleh setiap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari ketiga wilayah tersebut.
 - 2) Selalu melakukan pemantauan terhadap *Non – Revenue Water* (NRW) volume air tak berekening atau volume kebocoran sehingga tidak mengalami kerugian yang cukup besar.
 - 3) Mencari sumber mata air yang baru guna untuk memenuhi kebutuhan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota

Tegal yang tadinya sumber mata air dari Banyumudal, Pemalang untuk Kota Tegal ternyata dialihkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Brebes, karena tidak bisa ditarik kembali untuk pemenuhan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal maka Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah untuk segera mencari sumber mata air yang baru.

2. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal

- 1) Melakukan terobosan baru pengolahan air sehingga tidak selalu bergantung dengan pihak Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.
- 2) Untuk melakukan penambahan sambungan konsumen baru perlu berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat memastikan untuk penambahan konsumen sambungan baru dapat memperoleh fasilitas air bersih atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL dan ARTIKEL:

- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muryanto, Taruno, Yudho. 2014. *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam rangka mewujudkan GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Maleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Efendi Jonaedi,. dan Ibrahim Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris cet.2*, Depok : Prenadamedia Group.
- Tim Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasionl.
- Siyoto Sandu,. dan Sodik Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman : Literasi Media.
- Profil PDAM Kota Tegal
- Tim Mahardika, “*KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*”, Pustaka Mahardika.
- Ramdhani Tri Muhammad,. dan Ramlah Siti. 2015. *Problematisa Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sdn-3 Telangkah Desa Hampalit Kabupaten Katingan*.
- Prasetyo Hananto. 2017. *pembaharuan hukum perjanjian sportentertainment Berbasis nilai keadilan (studi kasus pada petinju profesional di indonesia)*. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.
- Chrystofer,. Priyono Agus Ery,. dan Njatrijani Rinitami. 2017 *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Saebani Ahmad Beni,. Mayaningsih Dewi,. dan Wati Ai. 2016. *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Anom I Gusti Ngurah. 2015. *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Denpasar : Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Eddy Richard. 2010. *Aspek Legal Properti Teori, Contoh dan Aplikasi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.

Prabandari Retno. 2007. Tesis : *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang

Deny Cristian. 2014. *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Reinhard Politon. 2017. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para pihak dalam kontrak Ditinjau dari kitab undang undang Hukum perdata*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

KONSTITUSI dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal.

Tim Mahardika. *KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Pustaka Mahardika.

WEBSITE:

<https://pdabtirtautama.com/profil>

https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/masalah-dan-latar-belakang-masalah_maulidiah_oke.pdf

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<https://www.banjirembun.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html>

<http://digilib.unila.ac.id/9846/2/II.%20Tinjauan%20Pustaka%202.pdf>

<http://repository.fkip.unja.ac.id/file?i=AjNUmj1QhXxgRP3-t4JQKyX64-tF2P2ksqbpfxmrhjo>

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html>

[http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+\(Bentuk+Badan+Usaha\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+(Bentuk+Badan+Usaha).pdf)

<http://e-journal.uajy.ac.id/8673/3/2EA15189.pdf>

<https://docplayer.info/storage/75/72736382/72736382.pdf>

<https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-bums-hingga-peran-tahapannya>

<http://eprints.umpo.ac.id/3473/2/BAB%20I.pdf>

<https://akuntanonline.com/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan-cv-pt-firma>

<https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>

<http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan>

[wanprestasi.html#:~:text=Pengertian%20prestasi%20adalah%20sesuatu%20yang%20wajib%20dipenuhi%20oleh%20debitur%20dalam%20setiap%20perikatan.&text=Dalam%20hukum%20perdata%20kewajiban%20memenuhi%20prestasi%20selalu%20disertai%20jaminan%20harta%20kekayaan%20debitur](http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan-wanprestasi.html#:~:text=Pengertian%20prestasi%20adalah%20sesuatu%20yang%20wajib%20dipenuhi%20oleh%20debitur%20dalam%20setiap%20perikatan.&text=Dalam%20hukum%20perdata%20kewajiban%20memenuhi%20prestasi%20selalu%20disertai%20jaminan%20harta%20kekayaan%20debitur)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dhany Firsta Banani

NPM : 5116500051

Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Tegal, 11 Mei 1997

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Bawal Wijaya RT 07 / RW 31
Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Tegal Sari
Kota Tegal

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SD Negeri Tegal Sari 08	2004	2010
2.	SMP Negeri 3 Kota Tegal	2010	2013
3.	SMK Negeri 1 Adiwerna	2013	2016
4.	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Juli 2020

Hormat saya,

Dhany Firsta Banani